

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Wilayah teritorial Indonesia seluas 3,1 juta km², dengan 2,7 juta km² di bawah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia sangat besar dan dapat dikatakan terbesar di dunia.. Data Kementerian Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa kekayaan dan potensi sumber daya alam sktor kelautan dan perikanan diperkirakan mencapai US\$ 171 miliar per tahun, dengan wilayah pesisir senilai 2 miliar dolar, minyak bumi senilai 21 miliar dolar, dan transportasi laut senilai 20 miliar dolar.¹

Sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia memiliki arti strategis yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia dari segi ekonomi, sosial dan ekologi. Peranan sektor perikanan dalam perekonomian dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Penangkapan ikan memegang peranan penting bagi jutaan orang yang bergantung pada sektor tersebut, sehingga sering disebut sebagai “*employment of last resort*”, dimana tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor lain mudah diserap oleh sektor tersebut.² Sumber daya kelautan Indonesia tidak hanya berasal dari perikanan, tetapi juga dari industri pariwisata, perdagangan, transportasi, dan industri kelautan. Sebagian besar orang yang tinggal di daerah pesisir bergantung pada hasil laut jika mereka tidak dapat

¹ Jubel Hot. P Simanullang, Fitri Eriyanti. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap oleh DKP Kota Padang dalam Meningkatkan Pendapatan. *Jurnal of Multidisiplinary Research and Development. Vol 1, No.2*

² Akhmad, Fauzi. (2010). *Ekonomi Perikanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal.9

bekerja di bidang lain. Hasil Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 menunjukkan bahwa nelayan adalah salah satu pekerjaan paling miskin di Indonesia. Diantaranya mereka yang bekerja di sektor perikanan, pelayanan restoran sebesar 5,56 %, konstruksi bangunan sebesar 9,86%, dan pengelolaan sampah sebesar 9,62%.³ Pengelolaan kawasan pesisir pantai identik dengan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan nelayan yang hidupnya bergantung kepada hasil laut. Sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Akibatnya, diperlukan inovasi yang memungkinkan nelayan mendapatkan akses terhadap peningkatan modal, teknologi, keterampilan, dan budaya yang berkelanjutan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.

Penangkapan ikan laut di Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman terjadi di Sumatera Barat, yang merupakan salah satu daerah penghasil ikan laut utama dan potensial di Pulau Sumatera. Hasil-hasil tangkapan itu antara lain ikan laut, binatang berkulit keras dan lunak. Diperkirakan dari semua jenis kekayaan lautnya hingga dewasa ini baru sekitaran 405 dari potensi lestariannya yang didayagunakan. Namun dari banyaknya potensi hasil kekayaan laut di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar pesisir maupun nelayan yang bergantung pada hasil laut yang potensial tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan atau keterbatasan modal usaha, teknologi hasil tangkapan yang masih tradisional, keterbatasan kapasitas

³ Dewi, M.F., & Dadiara, F.S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Skpt) di Kabupaten Maluku Barat Daya. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah)*, 82-100

dan sumber daya pengelola, kondisi alam, dan perubahan musim yang tidak pasti adalah beberapa penyebab kemiskinan nelayan itu sendiri. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan yang tidak konsisten dan merugikan pendapatan nelayan.⁴ Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mencapai sebesar 340,37 ribu orang, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Lihat peta kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023

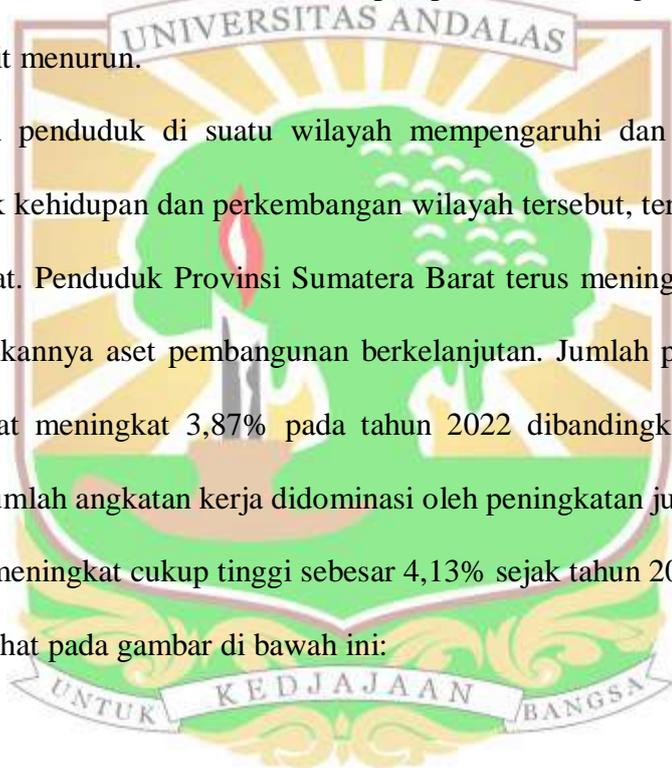
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) Number of Poor People (thousand people)		Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1. Kep. Mentawai	13,74	13,76	13,97	13,72
2. Pesisir Selatan	33,78	35,09	7,11	7,34
3. Solok	27,16	27,33	7,12	7,13
4. Sijunjung	15,07	15,02	6,00	5,88
5. Tanah Datar	14,91	14,57	4,26	4,16
6. Padang Pariaman	26,44	26,93	6,25	6,34
7. Agam	31,33	33,41	6,22	6,60
8. Lima Puluh Kota	26,00	27,02	6,59	6,80
9. Pasaman	19,94	19,99	6,85	6,80
10. Solok Selatan	11,81	11,91	6,51	6,45
11. Dharmasraya	15,08	15,49	5,56	5,56
12. Pasaman Barat	32,91	33,52	6,93	6,92
<i>Kota/Municipality</i>				
1. Padang	42,37	41,97	4,26	4,17
2. Solok	2,28	2,35	3,02	3,05
3. Sawahlunto	1,47	1,47	2,28	2,27
4. Padang Panjang	2,89	2,99	5,14	5,24
5. Bukittinggi	6,16	5,78	4,46	4,11
6. Payakumbuh	8,08	7,88	5,66	5,44
7. Pariaman	3,80	3,91	4,13	4,20
Sumatera Barat	335,21	340,37	5,92	5,95

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2024

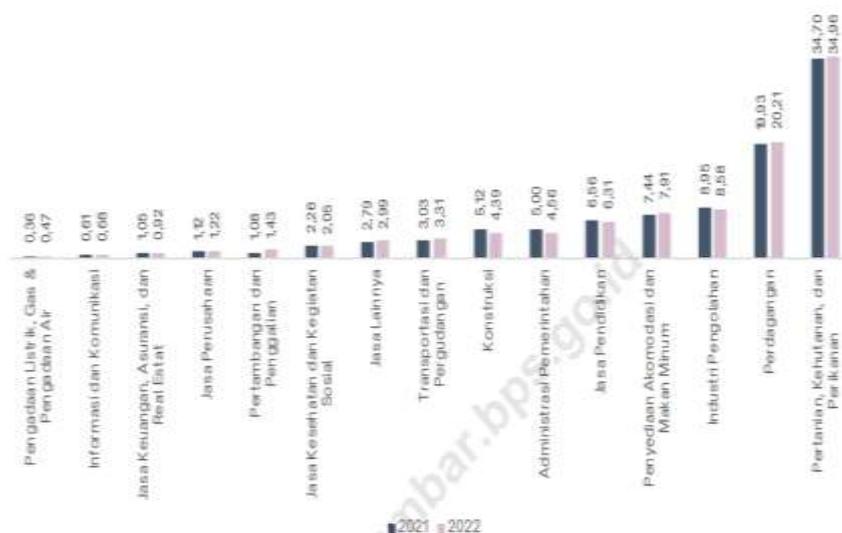
⁴ Hamdani, H. & Wulandari, K. (2017). Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. *Jurnal Elektronik Ilmu Sosial dan Politik (E-SOSPOL)*, 3(1), 62-67

Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 41,97 ribu jiwa. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk miskin meningkat dari 335,21 ribu pada tahun 2022 menjadi 340,37 ribu pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin turun sedikit dari 5,92% pada tahun 2022 menjadi 5,95% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang miskin telah meningkat di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, meskipun persentase orang miskin di tingkat provinsi sedikit menurun.

Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan perkembangan wilayah tersebut, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Penduduk Provinsi Sumatera Barat terus meningkat sejak tahun 2020, menjadikannya aset pembangunan berkelanjutan. Jumlah pekerja Provinsi Sumatera Barat meningkat 3,87% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, peningkatan jumlah angkatan kerja didominasi oleh peningkatan jumlah penduduk bekerja yang meningkat cukup tinggi sebesar 4,13% sejak tahun 2021, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 2 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (%)



Sumber: Statistik Daerah Sumatera Barat 2023

Berdasarkan gambar 1.2 di atas walaupun jumlah pengangguran adanya peningkatan dari tahun 2021, peningkatannya tidak terlalu signifikan yaitu 0,8%. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Sumatera Barat naik 0,24% poin menjadi 93,72 pada tahun 2020. Artinya, dari 100 orang yang bekerja, sekitar 94 orang dapat bekerja, dan mempertahankan pekerjaan. Dirinci menurut distribusi berdasarkan lapangan pekerjaan utama sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 di atas, penduduk bekerja di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 terserap paling banyak di serkor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 34,96%, meningkat 0,26% poin dibanding tahun 2021, dengan penambahan sebanyak 44,08 ribu jiwa.

Kota Padang adalah sebuah kawasan perkotaan di pantai barat Pulau Sumatera. Salah satu kota terbesar di Sumatera Barat dan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki banyak penduduk yang ingin menjadi

nelayan karena lokasinya di kawasan pesisir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dari tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki jumlah rumah tangga nelayan yang stabil dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Rumah Tangga Nelayan di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut		
		2020	2021	2022
1.	Kepulauan Mentawai	5.381	5.304	5.304
2.	Pesisir Selatan	4.854	-	-
3.	Padang Pariaman	774	1.609	1.697
4.	Agam	236	362	362
5.	Pasaman Barat	2.802	5.245	5.245
6.	Kota Padang	1.299	1.294	1.294
7.	Kota Pariaman	456	1.183	1.183
Jumlah		15.500	14.997	15.085

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga nelayan yang tersebar di pesisir pantai Sumatera Barat pada tahun 2020 sebesar 15.500 dan di tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah 14.997 namun pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 15.085. Pada umumnya, masyarakat pesisir adalah nelayan, dan sebagai bagian dari masyarakat yang terpinggirkan, mereka masih berjuang dengan berbagai masalah kehidupan, termasuk masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Kehidupan mereka memprihatinkan terutama secara ekonomi karena penghasilan mereka bergantung pada alam, sehingga akan sulit untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Gambar 1. 3 Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2021-2022

Kecamatan Subdistrict	Penuh Full Time		Sambilan Part Time		Jumlah Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bungus Teluk Kabung	1 585	1 583	130	130	1 715	1 713
2. Lubuk Kilangan	-	-	-	-	-	-
3. Lubuk Begalung	980	981	114	114	1 094	1 095
4. Padang Selatan	888	889	92	92	980	981
5. Padang Timur	-	-	-	-	-	-
6. Padang Barat	390	391	23	23	413	414
7. Padang Utara	661	540	50	50	711	590
8. Nanggalo	30	152	8	8	38	160
9. Karanj	-	-	-	-	-	-
10. Pauh	-	-	-	-	-	-
11. Koto Tangah	1 984	1 981	123	123	2 107	2 104
Kota Padang	6 518	6 517	540	540	7 058	7 057

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2023

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat pada tahun 2022 tersebar sebanyak 7.057 jiwa penduduk pada tujuh kecamatan di Kota Padang yang berprofesi sebagai nelayan. Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan terbesar di Kota Padang, yaitu berjumlah 2.104 jiwa dari 7.504 jiwa nelayan yang ada. Profesi nelayan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu nelayan penuh dan nelayan sambilan. Dapat dilihat pada data berikut:

Gambar 1. 4 Jumlah Nelayan menurut Jenis di Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2022

Jenis Type	Jumlah Total
(1)	(2)
Penuh Full Time	1 981
Sambilan Part Time	123

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
Source : Maritime Affairs and Fisheries Extension of Padang

Sumber: Koto Tangah dalam Angka 2023

Berdasarkan data pada gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwasanya terdapat 1.981 jiwa penduduk yang berprofesi sebagai nelayan penuh di Kecamatan Koto Tangah, sedangkan untuk nelayan sambilannya hanya sejumlah 123 jiwa. Menurut Kelurahan Pasie Nan Tigo hingga saat ini penduduk yang memiliki profesi sebagai nelayan mencapai angka >1000 jiwa, dengan kata lain hampir 50% nelayan yang berada di Kecamatan Koto Tangah berasal dari Kelurahan Pasie Nan Tigo mengingat daerah ini memang berada di kawasan pesisir pantai. Kelurahan ini baru dibentuk pada tahun 2001 setelah penggabungan beberapa kelurahan di Kecamatan Koto Tangah oleh Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2001, yang memangkas 24 kelurahan menjadi 13 kelurahan.

Pasie Nan Tigo adalah kelurahan pesisir yang terdiri dari 14 RW. Kelurahan ini berada di dataran rendah dengan ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lahan 0-2%. Lokasi kelurahan di laut menjadikannya dataran rendah.⁵ Menurut Koto Tangah dalam Angka (2018), Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki luas wilayah ±5359 Ha dengan 9.444 jiwa yang tinggal di sana, dengan kepadatan penduduk sebesar 648 orang per km². Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, dengan 60% dari total penduduk bergantung pada pekerjaan nelayan.⁶

Kelurahan Pasie Nan Tigo terdiri dari gabungan tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Pasie Sabalah, Kelurahan Pasie Kandang, dan Kelurahan Pasir Jambak, karena nama pantainya adalah Pasie Sabalah, Pasie Kandang, dan Pasir Jambak.

⁵ Haryani, H., & Aditia, E. (2018). Pembuatan Profil RW Berbasis Masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 167-178.

⁶ Zuriyani, E., & Despica, R. (2020). Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik oleh Ibu-ibu Rumah Tangga Kelurahan Pasir Nan Tigo. *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang*, 1(2), 33-46.

Pada ketiga kawasan ini banyak terdapat perahu payung motor, perahu bagan, pembuatan jaring, penjemuran ikan serta kapal bagan pada bibir pantainya, dimana kapal tersebut beroperasi untuk menangkap ikan. Oleh sebab itu hampir sebagian besar penduduk bergantung kepada hasil laut sebagai mata pencaharian nelayan, baik nelayan tetap maupun nelayan sambilan.

Berdasarkan fakta dilapangan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, seperti kurangnya sarana dan prasarana nelayan untuk menangkap ikan maupun pengolahan hasil tangkapan, tingginya biaya operasional juga merupakan kendala yang berpengaruh bagi proses nelayan untuk melaut. Karna itu perlu adanya tindakan khusus yang dapat meningkatkan kondisi masyarakat nelayan mencapai tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 85 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2015 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang adalah perangkat pemerintah daerah yang menangani masalah kelautan dan perikanan di Kota Padang. Dinas Perikanan dan Pangan

Kota Padang terbagi menjadi bidang, yang mana tiga di antaranya merupakan bidang yang berkaitan dengan perikanan yaitu, bidang perikanan tangkap, bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, dan bidang perikanan budidaya. Sedangkan dua bidang lainnya yaitu bidang ketersediaan distribusi pangan dan bidang konsumsi dan keamanan pangan bergerak pada permasalahan pangan. Terdapat beberapa program kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing bidang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Daftar Program Dinas Perikanan Kota Padang

No.	Bidang Urusan	Kegiatan Program	Sub Kegiatan
1.	Bidang Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam satu Daerah Kab/Kota	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Pengembangan kapasitas nelayan kecil
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2.	Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di daerah Kab/Kota
3.	Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu)
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.2 Program Dinas Perikanan Kota Padang di atas, terdapat lima kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan; dan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha sadar, terencana, dan sistematis yang bertujuan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik melalui pengelolaan potensi sumber daya yang dimilikinya guna mencapai

kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, dapat diartikan sebagai upaya yang terus menerus dan berkesinambungan.⁷ Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang memiliki tujuan jangka menengah dan sasaran yang ingin dicapai. Dimana tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat diuraikan seperti meningkatkan industri hasil kelautan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah seperti meningkatkan industri hasil kelautan perikanan, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kelautan maupun perikanan, dan meningkatkan pola konsumsi ikan. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang memiliki misi Meningkatkan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perdagangan sektor kelautan dan perikanan dengan sasaran seperti meningkatkan industri hasil kelautan dan perikanan. Untuk menjalankan ini semua Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang memiliki strategi seperti peningkatan produksi perikanan (tangkap, budidaya, olahan perikanan) serta peningkatan industri hulu sektor kelautan dan perikanan.⁸

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu proses yang dilakukan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang untuk mencapai misi dan tujuan di atas, karena pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, maka masyarakat nelayan belum dapat mencapai tujuan ini, seperti yang ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kehidupan mereka masih bergantung pada mata pencarian sebagai nelayan. Selain itu produksi ikan yang dihasilkan di

⁷ Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 793-804.

⁸ Rencana Kerja DP3AP2KB, 2019

Kecamatan Koto Tengah pada tahun 2022 terbilang masih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Lubuk Begalung yang jumlah nelayannya di bawah Kecamatan Koto Tengah seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 5 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kota Padang Menurut Kecamatan dan Subsektor (Ton) Tahun 2021-2022

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut <i>Marine Fisheries</i>		Perairan Umum <i>Inland Water</i>		Jumlah Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bungus Teluk Kabung	4 240,23	4 350,45	-	1,35	4 240,23	4 350,45
2. Lubuk Kilangan	-	-	1,41	1,10	1,41	1,35
3. Lubuk Begalung	7 874,71	8 104,67	1,15	-	7 875,86	8 105,72
4. Padang Selatan	2 019,16	1 986,87	-	-	2 019,16	1 986,87
5. Padang Timur	-	-	-	-	-	-
6. Padang Barat	605,75	611,73	-	-	605,75	611,73
7. Padang Utara	403,83	398,70	-	-	403,83	398,70
8. Nanggalo	100,96	96,68	1,39	1,43	102,35	98,11
9. Kuranji	-	-	1,65	1,70	1,65	1,70
10. Pauh	-	-	-	-	-	-
11. Koto Tengah	4 946,93	4 652,88	1,85	1,95	4 948,78	4 654,83
Padang	20 191,6	20 202	7,5	7,5	20 199	20 209,5

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2023

Berdasarkan pada data jumlah produksi perikanan tangkap Kota Padang di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan Kecamatan Koto Tengah pada tahun 2022 sebanyak 4.654,83 ton yang berarti berada di bawah jumlah produksi perikanan dari Kecamatan Lubuk Begalung yang mencapai sebanyak 8.105,72 ton, dimana perbedaannya selisih hampir 50% dari pendapatan Kecamatan Lubuk Begalung, padahal seperti yang diketahui apabila dilihat dari luas cakupan

tangkapannya serta jumlah penduduk nelayan Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan yang paling luas dan paling banyak jumlahnya.

Menurut Pasal (25) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, pemberdayaan nelayan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, kemitraan usaha, pembiayaan dan permodalan, dan penguatan kelembagaan. Untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kreativitas keluarga nelayan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah, kegiatan pemberdayaan yang fokus pada keterlibatan dan peran dalam rumah tangga nelayan serta keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga nelayan.

Proses yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang untuk Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo pada penelitian ini diukur dengan menggunakan teori Ambar Teguh Sulistiyani yang mana didalamnya terdapat tiga tahap, yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa perlu menuju peningkatan kapasitas diri; tahap transformasi kemampuan yang mencakup wawasan dan keterampilan; dan tahap ketiga, peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian.⁹

Menyadarkan dan membentuk sikap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai pemberdaya dan aktor pada tahap ini meningkatkan keinginan untuk berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan meningkatkan keterampilan di lingkungan sekitar. Dimana motivasi tersebut dapat mempengaruhi kesadaran dan

⁹ Dra. Ambar Teguh Sulistiyani (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Madi, hal.83

keinginan untuk belajar lebih banyak lagi. Tahapan ini, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melakukan pengadaan penyuluhan dimana penyuluh melakukan pendampingan kepada masyarakat seperti pendampingan pembentukan legalitasasi izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dan pendampingan pembentukan koperasi. Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemberdayaan kelompok nelayan yang dilakukan oleh penyuluh dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

Gambar 1. 6 Pertemuan Penyuluh dan Kelompok Nelayan



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2023

Gambar 1.5 menunjukkan pertemuan yang dilakukan oleh penyuluh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dengan masyarakat nelayan. Pengelola menghadapi tantangan awal untuk mendorong masyarakat agar aktif dan peduli, sehingga kegiatan ini tidak dilakukan hanya sekali. Salah satu kendala dari kelompok nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah keterbatasan modal usaha, dimana modal merupakan pengaruh besar dalam proses peningkatan ekonomi usaha nelayan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat nelayan yang memiliki usaha dalam bidang perikanan sebagai berikut ini:

“...jika berbicara tentang modal, kami nelayan sebagai pelaku usaha juga memiliki

keterbatasan dalam pemenuhan modal usaha, dimana hal ini lah yang membuat kami mencari bantuan alternatif seperti meminjam sejumlah uang di bank, karena kurangnya bantuan baik sarana maupun prasarana yang diberikan oleh pemerintah, jikalau ada pun itu tidak akan cukup..” (Wawancara dengan Riki Masyarakat Nelayan, Pada 9 Juni 2023, Pukul 10.10 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat merasa bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang, dapat dikatakan belum bisa memenuhi kebutuhan modal usaha yang akan dikelola oleh kelompok nelayan sehingga beberapa nelayan mencari cara alternatif lain seperti meminjam dana di bank untuk dapat memenuhi kebutuhan modal yang mana ini akan berdampak pada proses pengelolaan usaha yang dapat menunjang peningkatan pendapatan nelayan yang berkaitan.

Setelah masyarakat nelayan sadar dan peduli terhadap kelompok nelayan, mereka mulai mengembangkan wawasan dan kemampuan. Pada tahap ini Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melakukan pemberian keterampilan serta wawasan melalui pelatihan-pelatihan yang ada, dengan cara mengumpulkan masyarakat nelayan ditempat yang telah ditentukan seperti kantor lurah maupun SP3N. Dalam proses peningkatan kemampuan pihak Dinas Perikanan meninjau langsung ke masyarakat nelayan untuk melihat kondisi nelayan yang layak mendapatkan bantuan alat yang menunjang kemampuan tangkap oleh nelayan tersebut. Melihat kondisi masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo yang hidup di bawah garis kemiskinan, karena tidak ada perahu atau sarana penangkapan ikan yang kurang memadai, sehingga banyak warga setempat yang menumpang di perahu tetangga untuk melaut bersama mencari ikan. Hasil tangkapan akan dibagi

ke beberapa orang nelayan yang ikut serta. Selain itu, cuaca yang tidak menentu juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan sehingga membuat warga tidak memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya.¹⁰ Setelah melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mengambil keputusan untuk memberikan bantuan langsung seperti mesin tempel yamaha 15 PK, dimana alat ini dapat digunakan pada perahu yang dipakai nelayan pergi menangkap ikan. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 7 Kegiatan Penyerahan Bantuan Langsung



Bantuan mesin tempel diberikan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan dimana dengan adanya alat ini dapat mengatasi permasalahan nelayan seperti nelayan yang belum memiliki mesin pendorong perahu maupun menggantikan mesin-mesin yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan waktu melakukan aktivitas menangkap ikan. Dengan adanya bantuan alat ini

¹⁰ Gumanti, Rahmad, et al. (2022). Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Memberdayakan Masyarakat Nelayan Miskin di Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo, Padang. *Socio Humanus* 4.3 (186-193)

diharapkan adanya peningkatan produksi hasil tangkapan ikan yang berpengaruh pada pendapatan nelayan yang bersangkutan. Tidak hanya itu alat ini juga berpengaruh dalam hal mengoptimalkan sumber daya perikanan yang meningkatkan kesempatan kerja nelayan. Kegiatan bantuan ini dibiayai melalui Dana APBD Tahun 2022 dengan judul Program Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten/Kota dengan Subprogram Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Kota Padang pada tahun 2022. Akan tetapi pemberian bantuan secara berkelompok ini dapat dikatakan kurang efektif dilakukan karena memungkinkan terjadinya gesekan atau konflik antar masing-masing anggota kelompok, seperti yang disampaikan oleh Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan berikut:



“..adanya potensi keributan dan konflik saat menggunakan fasilitas bersama, sehingga hal ini membuat beberapa kelompok nelayan memilih untuk tidak bergabung pada kepada SPP untuk menghindari terjadinya perpecahan..” (Wawancara bersama Asnelly, kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasie Nan Tigo, 19 Mei 2023, Pukul 17.15 WIB)

Dengan adanya faktor pemicu konflik dalam penggunaan alat pengolahan maupun alat penunjang proses penangkapan yang ada di Sentra Pengolahan Perikanan secara bersama-sama membuat jangkauan pembinaan masyarakat kelompok nelayan menjadi tidak dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu, alih fungsi hibah menyebabkan masyarakat nelayan tidak menggunakan alat yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang di Sentral Pengolahan Perikanan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo sepenuhnya sesuai dengan fungsi awalnya. Hal ini dapat dilihat pada bangsal pengolahan, yang menawarkan berbagai fasilitas untuk mengolah ikan, seperti pemisah tulang ikan, alat pencetak

bakso, dan mesin pendingin. Keleluasaan yang ada pada pengolahan pada awalnya berfungsi, tetapi pengolah tidak terlalu tertarik padanya.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat ini adalah bantuan pemberdayaan yang diberikan pemerintah kurang tepat; beberapa bantuan tidak dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan. Bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan meliputi: 1) lemari asap yang tidak sesuai dengan jenis ikan yang akan diolah oleh kelompok nelayan; nelayan Pasie Nan Tigo membuat ikan pukek tanpa lemari asap, dan ikan kering hanya menggunakan tungku rebus dan balet penjemur di bawah sinar matahari; dan 2) jaring tancap, yang tidak menghasilkan ikan nila karena kondisi lingkungan karena budi daya yang dilakukan di muara sungai yang terkena pasang surut air laut, serta paket bantuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi; dan 3) bantuan bibit sirsak, rata-rata masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tidak tahu cara menanam pohon sirsak yang baik serta kemungkinan jenis tanah pasir yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo tidak cocok untuk tanaman pohon sirsak.¹¹

Akan tetapi ada beberapa hibah atau bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil di Kota Padang, dimana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan kelompok usaha bersama bersama nelayan yang sudah diidentifikasi serta verifikasi oleh dinas. Bentuk bantuan yang diberikan berupa

¹¹ Dewi, T. K., Agustar, A., & Mahdi, M. (2019). Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(1), 40-50

alat-alat seperti mesin tempel, fish box fiber, jaring multifilamen, genset dan lainnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

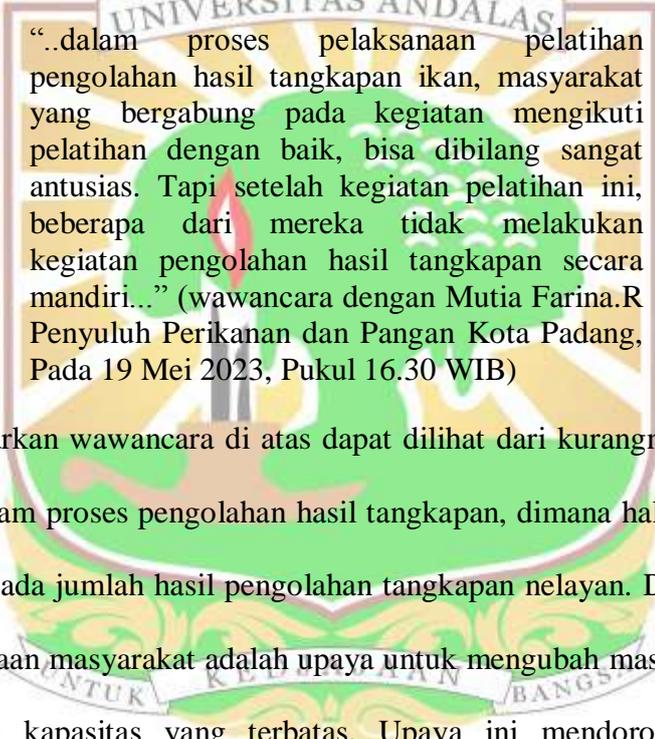
Tabel 1. 3 Data Hibah Barang kepada Kelompok Nelayan Tahun 2022

No	KUB	Jenis Bantuan	Jumlah Unit
1.	Batang Kajai	Fish Box Fiber	2 unit
		Mesin Tempel 15 PK	4 unit
2.	Gosong India	Fish Box Fiber	14 unit
		Mesin Tempel 15 PK	3 unit
		Mesin Tempel 40 PK	2 unit
3.	Samudera	Fish Box Fiber	7 unit
4.	Ombarang	Mesin Genset	1 unit
		Mesin Tempel 15 PK	2 unit
		GPS	1 unit
		Jaring Insang Multifilament	51 unit
		Kapal Motor	1 unit
		Lampu Sorot LED 250	8 unit
		Mesin Tempel 40 PK	1 unit
5.	Tanjung Sakato	Mesin Genset	1 unit
		GPS	1 unit
		Lampu Sorot LED 250	5 unit
		Mesin Tempel 15 PK	2 unit
6.	Robin Mandiri	Jaring Insang Multifilament	51 unit
		Mesin Long Tail 6.5 PK	8 unit
		Mesin Tempel 15 PK	2 unit
		Perahu Boat Standar Pengrajin	2 unit
7.	Sepakat Bersama	Jaring Insang Multifilament	45 unit
		Mesin Tempel 15 PK	4 unit
8.	Kelompok Nelayan Karang Permai (KNKP)	Perahu Kayu	2 unit
9.	Patenggangan Indah	Perahu Kayu	5 unit

Sumber: Olahan Peneliti, 2023 (KAK, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang)

Tahap ketiga meliputi pengadaan dan pengembangan intelektual serta keterampilan yang diperlukan untuk membangun keterampilan mandiri. Mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru

dan kreatif untuk lingkungan mereka.¹² Jumlah hasil tangkapan di Kelurahan Pasié Nan Tigo menunjukkan kesadaran masyarakat nelayan tentang mengembangkan hasil tangkapan ikan. Pengembangan hasil tangkap disini berupa olahan nugget ikan, bakso ikan, dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan melalui proses awal pelatihan yang diberikan oleh penyuluh, namun sampai saat ini belum tersalurkan secara optimal. Hal ini juga dibenarkan oleh penyuluh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai berikut:



“..dalam proses pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil tangkapan ikan, masyarakat yang bergabung pada kegiatan mengikuti pelatihan dengan baik, bisa dibilang sangat antusias. Tapi setelah kegiatan pelatihan ini, beberapa dari mereka tidak melakukan kegiatan pengolahan hasil tangkapan secara mandiri...” (wawancara dengan Mutia Farina.R Penyuluh Perikanan dan Pangan Kota Padang, Pada 19 Mei 2023, Pukul 16.30 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat dari kurangnya kemandirian masyarakat dalam proses pengolahan hasil tangkapan, dimana hal tersebut sangat berdampak kepada jumlah hasil pengolahan tangkapan nelayan. Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengubah masyarakat nelayan yang memiliki kapasitas yang terbatas. Upaya ini mendorong pengelolaan kampung nelayan oleh pemerintah melalui berbagai upaya seperti menyadarkan dan membentuk sikap, mengubah wawasan, dan meningkatkan kapasitas pengetahuan pada tingkat dasar individu, kelompok, dan sistem untuk mencapai situasi yang mandiri.

¹² Florensi Helen. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Vol. 1, No.1. Hal 6*

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jubel Hot. P.Simanullang pada tahun 2019 tentang cara DKP Kota Padang mendorong masyarakat nelayan untuk meningkatkan pendapatan, penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat nelayan masih apatis dan kurang mendukung program pemberdayaan pemerintah. Akibatnya, masyarakat nelayan belum sepenuhnya memahami program pemberdayaan pemerintah.¹³ Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang bagaimana pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dilaksanakan, mengingat ekonomi Kelurahan Pasie Nan Tigo sebagian besar bergantung pada hasil laut, yang menjadikan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, menjadi nelayan tidak berarti mereka harus mencari pekerjaan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena yang ada yaitu mengenai tahapan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Nelayan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo yang Dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Tahapan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelompok Nelayan Pasie Nan Tigo oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang?” berdasarkan latar belakang di atas.

¹³ Simanullang, J. H., & Eriyanti, F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap oleh DKP Kota Padang dalam Meningkatkan Pendapatan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(2), 253-263.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang Tahapan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang pada kelompok nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan keilmuan administrasi publik dan menjadi referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, terutama mereka yang bekerja di bidang administrasi pembangunan yang mempelajari tentang pemberdayaan masyarakat pada kelompok nelayan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, referensi, dan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat yang digunakan pada kelompok nelayan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan lembaga pemerintah tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan fungsi program dari Kampung Nelayan.